

---

**PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI PMDN  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN KOTA JAMBI**

**Muhammad Sabyan<sup>1</sup>**

Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi<sup>1</sup>

**Mainita<sup>2</sup>**

Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi<sup>2</sup>

**Rina Widyanti<sup>3</sup>**

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>3</sup>

***Abstract***

*This study aims to see how the influence of per capita income and foreign investment investment in land and building tax revenues in the city of Jambi, and the results of research that have been conducted found that per capita income is positive, namely 238,773 meaning that every time there is an increase in per capita income of 1 rupiah, it will increase land and building tax income by 238,773 rupiah assuming other independent variables have a fixed value, for the PMDN investment variable the coefficient value is -34.875 with a negative value, meaning that if PMDN investment increases by 1 rupiah then land and building tax revenue will move down by 34.875 with the assumption the other variables are constant. By looking at the effect of per capita income on land and building tax receipts that can provide a positive value, the Jambi city government should play an active role in trying to increase the per capita income of the Jambi city community which can have an effect on land and building tax revenues.*

***Kata Kunci*** : income per capita, foreign investment to tax revenue

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita merupakan tujuan dari proses pembangunan suatu negara. Suatu negara mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tiap tahunnya berangsur-angsur meningkat. Indikator yang digunakan untuk melihat berhasil atau tidaknya pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan pula dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dimana dalam hal ini dapat diukur dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Pembangunan ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan serta pengangguran, yang merupakan suatu proses multidimensional dalam konteks pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Todaro, 2013).

Tingkat pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha. Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan untung atau malah merugi.

Pembangunan ekonomi dimaksudkan juga berupa usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dari tingkat pendapatan riil perkapitanya. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi

---

di samping menaikkan pendapatan riilnya juga di maksudkan untuk menaikkan produktivitasnya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka sistem ekonomi serta sikap dari output itu sendiri (Irawan dan Suparmoko, 2017).

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil ketika pendapatan perkapita suatu daerah mengalami peningkatan, upaya peningkatan pendapatan perkapita tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang. Artinya, suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Selain itu dampak yang terjadi apabila upaya pembangunan ekonomi berhasil yaitu terjadinya perubahan sosial dan perubahan struktur ekonomi.

Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung naik. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapita akan selalu mengalami kenaikan. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan menjalankan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2015).

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal (Marzuki Usman, 2012).

Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, seperti saham, obligasi dan lain-lain.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya (Jati, 2016). Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment System*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Jati, 2016). Dalam *Official Assessment System* ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif (Jati, 2016). Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ini (PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara *Official Assessment System* juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya (Wardani, 2015).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Suyono, 2016). Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi pajak (Handayani, 2012). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Kristanty, 2014). Menurut Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (Yusnidar, 2015).

## METODE

Dalam penelitian ini data yang akan diolah dan dianalisis untuk kepentingan penelitian adalah data adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang berkala yang di kumpulkan untuk menggambarkan tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (*time series*) periode penelitian 2010-2019

### Analisis Data

1. Model analisis untuk mengetahui pengaruh Pendapatan perkapita dan Investasi PMDN terhadap penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan maka digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan alat analisis sebagai berikut :

$$y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

y = Pajak Bumi Dan Bangunan

$X_1$  = Investasi PMDN

$X_2$  = Pendapatan Perkapita

$\alpha, \beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan pengujian model kuantitatif menggunakan Metode Linier Berganda, melalui program SPSS, dimana hasil Hipotesis pengujian model Regresi Linier Berganda dapat dilihat sebagai berikut

$$Y = 9,881 + 238,773 X_1 - 34,875X_2 + e$$

Nilai konstan sebesar 9,881 artinya jika tidak ada pergerakan dari faktor pendapatan perkapita dan investasi PMDN, maka pendapatan pajak bumi dan bangunan akan bergerak konstan sebesar 9,881. Nilai koefisien regresi variabel jumlah pendapatan perkapita bernilai positif, yaitu 238,773 artinya setiap terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar 1 rupiah, maka akan meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 238,773 rupiah dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, untuk variabel investasi pmdn nilai koefisien sebesar -34,875 dengan nilai negatif, artinya jika investasi PMDN bertambah sebesar 1rupiah maka pendapatan pajak bumi dan bangunan akan bergerak menurun sebesar 34,875 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai R Square ( $R^2$ ) atau kuadrat dari R, yaitu sebesar 0,514 artinya persentase pengaruh variabel pendapatan perkapita dan investasi PMDN terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 51,4% sedangkan sisanya 48,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di kota Jambi, dari hasil hitungan regresi berganda didapati bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh sebesar 238,773, dan untuk investasi PMDN mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan kota Jambi dengan nilai regresi sebesar -34,875, sedangkan untuk nilai koefisien determinasi didapati bahwa pendapatan perkapita dan investasi PMDN sebesar 0,514 artinya persentase pengaruh variabel pendapatan perkapita dan investasi PMDN terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 51,4% sedangkan sisanya 48,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

### SARAN

1. Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai pendapatan pajak bumi dan bangunan di kota Jambi, dengan begitu penulis dapat menyarankan kepada pemerintah kota Jambi untuk dapat memberikan kegiatan stimulant agar pendapatan perkapita masyarakat kota Jambi dapat meningkat, dan dengan begitu masyarakat akan mampu membayar pajak yang telah diwajibkan terhadap mereka
2. Investasi PMDN tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan, dengan begitu penulis dapat menyarankan kepada pemerintah kota Jambi untuk lebih selektif dalam mencari sumber pemungutan pajak bumi

---

dan bangunan pada kegiatan investasi pmdn ini agar kegiatan tersebut dapat juga memberikan sumbangsuhnya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota Jambi

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambok, Panguik dan Hafiz Ahsan Putra. 2019. *Analisis Efektifitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jambi Tahun 2014-2018*. Skripsi UIN Sultan Thaha Jambi
- Amanah, 2015. *Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude dan External Locus of Control Terhadap Personal Financial Management Behavior Pada Mahasiswa S1 Universitas Telkom*. e-Proceeding of Management, Vol 3 No 2, Hal 1228-1235
- Anonim. 2000. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Arsyad, Lincolin, 2015 *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Statistik Daerah Kota Jambi 2016: Badan Pusat Statistik Kota Jambi*.
- Bayu Kresna, Murti, 2018. *Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2000-2016*. Skripsi UNP Veteran Yogyakarta.
- Handayani, 2012. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tegalreso Kota Pekalongan Tahun 2008*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 2 "Reformasi Pajak: Perspektif Ekonomi, Hukum, Teknologi, Sosial, Budaya dan Agama.
- Hidayanti, 2011. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Irawan Dan Suparmoko, 2012. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE, Yogyakarta.
- Jati, 2016. *Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan*. EJurnal Akuntansi

---

Universitas Udayana, 1510-1535.

- Laksito, 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol.3, No.2, ISSN: 2337- 3806.
- Novtarisa, Dania. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi.
- Puspita, 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi, Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421.
- Singarimbun, 2011. *Metode penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Suandy, Erly. 2005. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sukirno, 2014. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryo, Aji, 2016, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba. Empat.
- Suyono, 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo*. Jurnal ppkm i (2016) 1-10.
- Todaro, 2013. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Usman, Marzuki, 2012. *Keuangan dan Perbankan Indonesia*. Jakarta : Pinandita Press.
- Wahyu, Aji, 2012. *Ekonomi*. Jakarta: PT. Glora Askara Pratama.
- Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi. Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset
- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.